



2024

LKjIP KECAMATAN MOJOAGUNG



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Tahun 2024 ini dibuat sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mewajibkan tiap Pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, bahwa peraturan tersebut sebagai acuan setiap instansi dalam menyusun dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja.

Sebagai gambaran keberhasilan dan ketidaktercapaian misi dan tujuan organisasi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun 2024, maka Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Diharapkan LKjIP ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan, khususnya bagi semua unit kerja yang ada untuk meningkatkan kinerjanya masing - masing di masa yang akan datang.

Mojoagung, 26 Januari 2025

CAMAT MOJOAGUNG
KABUPATEN JOMBANG



MUCHTAR, S.IP., M.Si
Pembina Tk. I
NIP.19720621 199803 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Mojoagung sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan pembenahan kinerja diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Mojoagung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan dengan berdasarkan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang serta selaras dengan tujuan dan sasaran Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 landasan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan harapan seluruh pihak. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Mojoagung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mojoagung Tahun 2024 disusun berdasarkan beberapa landasan hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018;
18. Peraturan Daerah No 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D) ;
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 45/D, Tambahan Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 45/D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041 (lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 10/E)

21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.
22. Peraturan Bupati Jombang No 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 10/E)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 10/A);
24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 114 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 114/A);

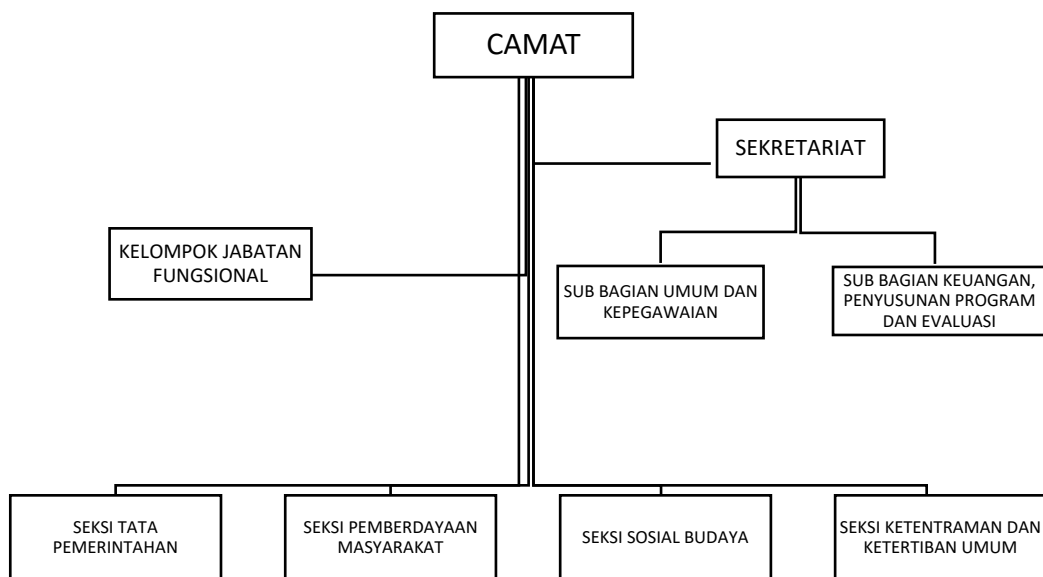
1.1 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang SOTK Kecamatan , terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Keuangan ,Penyusunan Program dan Evaluasi.
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi Kantor Kecamatan Mojoagung tersaji sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Mojoagung



1.1 Tugas dan Fungsi

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang dijabarkan sebagai berikut :

1. Camat

Kantor Kecamatan Mojoagung dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya Camat dibantu oleh:

1. Seksi Tata Pemerintahan
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Seksi Sosial Budaya
4. Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.

Sekretaris dibantu oleh:

- a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat ;

Tugas pokok Camat adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

- (1) Penyelenggaraan kewenangan wajib Kabupaten dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- (3) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- (4) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- (5) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- (6) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- (7) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- (8) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- (9) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- (10) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat, membawahi:

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Camat dalam melaksanakan, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendak di bidang ketatausahaan, administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat, mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. Pengelolaan urusan rumah tangga;
 - f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
 - h. Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
 - j. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat, membawahi

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- 1) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- 2) Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- 3) Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa;
- 4) Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- 5) Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan kecamatan;
- 6) Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- 7) Mengkoordinasikan dan menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal;
- 8) Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
- 9) Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi;
- 10) Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas:

- 1) Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- 2) Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- 3) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- 4) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;

- 5) Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- 6) Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- 7) Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- 8) Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

1. Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 2) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- 3) Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- 4) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- 5) Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 6) Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- 7) Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- 8) Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di kecamatan;
- 9) Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- 10) Melaksankan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum

musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

- 2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3) Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun swasta;
 - 4) Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa /Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
 - 6) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:
- 1) Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
 - 2) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana.
 - 3) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - 4) Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
 - 5) Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk Polri/TNI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;

- 6) Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 7) Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 8) Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- 9) Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- 2) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- 3) Melaksanakan penyelenggaraan administrasi di bidang sosial budaya;
- 4) Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- 5) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- 6) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

1.3 Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik masih sangat minim untuk mendukung pelayanan menuju Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani (WBBM), fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang kurang di Kecamatan Mojoagung adalah sarana bermain anak yang memadai, area parkir yang aman dan nyaman dan kantin pelayanan.

2. Penyusunan RKPDes tidak tepat waktu

Desa masih terlambat dalam penyusunan RKPDes, seharusnya RKPDes disusun paling lambat tanggal 30 September masih banyak Desa yang belum mengumpulkan RKPDes. Karena kurangnya koordinasi antara pihak DPMD, Kecamatan serta desa sangat mempengaruhi keterlambatan dalam penyusunan RKPDes.

3. Pembinaan Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kurangnya pembinaan Desa terhadap Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Desa sehingga kurang berkembang dan tidak dapat berjalan sebagaimana fungsinya.

4. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBDes tidak tepat waktu

Desa dalam menyusun laporan Pertanggungjawaban APBDes masih terlambat seharusnya Laporan Pertanggungjawaban APBDes disusun dan dilaporkan ke kecamatan paling lambat 3 minggu setelah berakhir tahun anggaran.

5. Kompetensi Aparatur Pelayanan Publik

Masih rendahnya kualitas dan kompetensi SDM yang ada di Kecamatan Mojoagung karena masih minimnya diklat dan bimbingan teknis yang dapat diikuti oleh pegawai.

6. Kurangnya kesadaran masyarakat di Kecamatan Mojoagung untuk tertib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), wilayah Kecamatan Mojoagung sudah bergerak kearah ekonomi maju dengan mayoritas penduduknya tidak hanya mengandalkan sektor pertanian saja tetapi juga sektor industri dan perdagangan. Akan tetapi kondisi ini tidak diimbangi dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk tertib membayar pajak.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, tidak terlepas dari beberapa masalah utama yang dihadapi, diantaranya adalah:

1. Sinkronisasi dan koordinasi terkait keterpaduan perencanaan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan
2. Mengembangkan dan terus berinovasi terkait model perencanaan pembangunan yang berbasis pemberdayaan dan peran serta masyarakat, sehingga perlu adanya perangkat hukum daerah terkait peningkatan perencanaan yang partisipatif;

3. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari proses perencanaan bottom-up sampai pada top-down, sehingga dapat mewujudkan perencanaan yang terukur dan tepat sasaran;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme aparatur perencana;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada;
6. Mengefektivitas monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan secara berkala.
7. Mengoptimalkan terkait pelaksanaan Zona Integritas berbasis WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) dengan komitmen Bersama antara pimpinan dengan staf dan juga aparatur desa.

1.4 Cascading Kinerja

Tujuan dan sasaran RPD ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Berdasarkan RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024 - 2026 pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang terkait dengan pencapaian Tujuan dari RPD Kabupaten Jombang yaitu Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi.

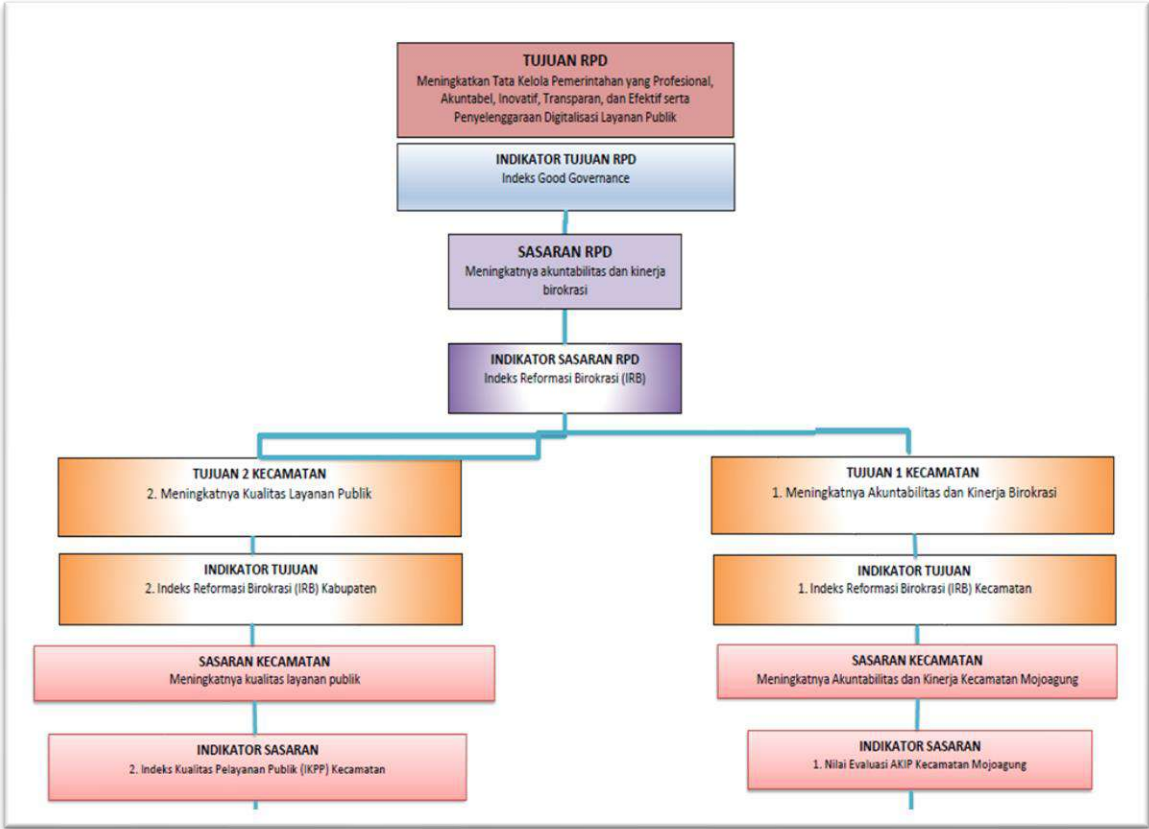
Indikator tujuan RPD adalah Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan. Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang mendukung sasaran RPD yaitu Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojoagung dan Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP).

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Tujuan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
- Adapun sasaran strategis dari tujuan meliputi
- (1) Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Mojoagung;
 - (2) Meningkatnya kualitas layanan publik

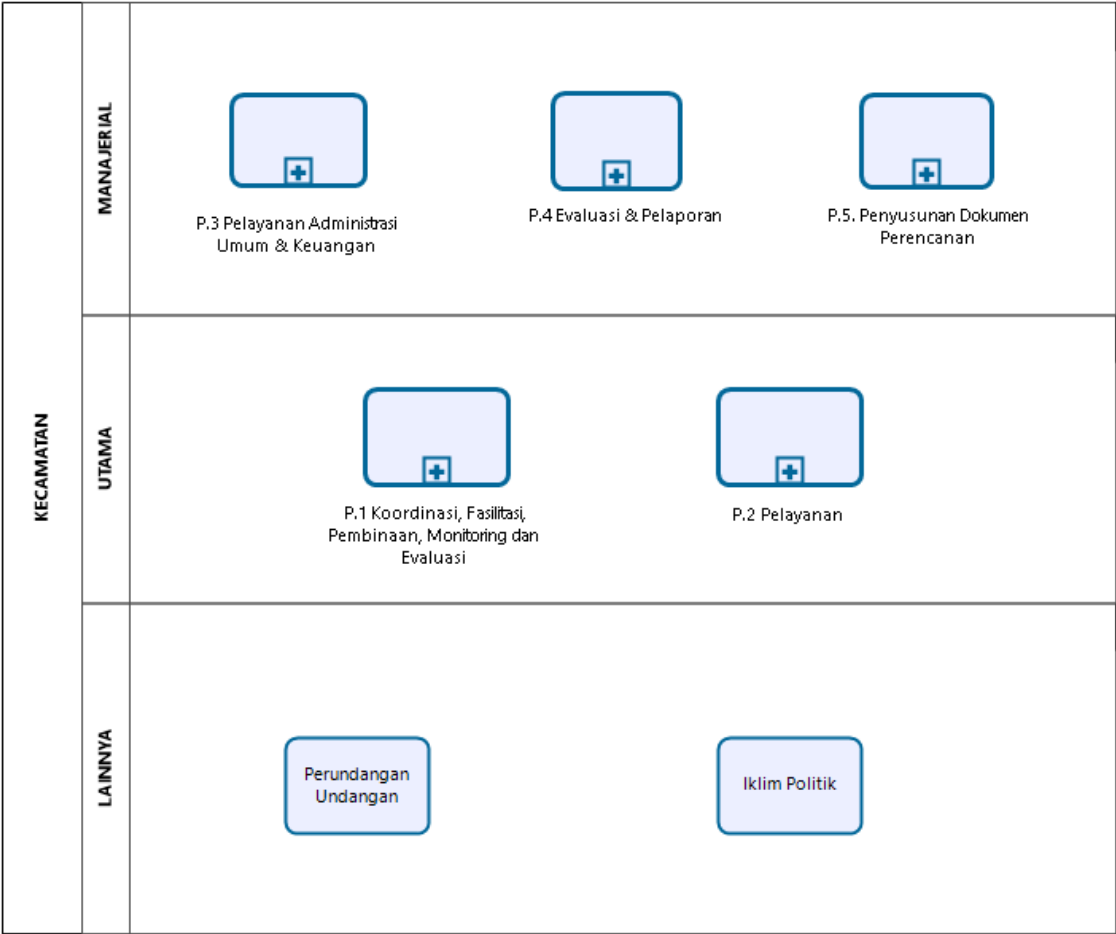
Gambar 1.2 Keterkaitan RPD 2024-2026 Kabupaten Jombang Dengan Renstra Kecamatan Mojoagung Tahun 2024 - 2026



1.5 Peta Proses Bisnis

Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang telah menetapkan Proses Bisnis supaya tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Proses bisnis Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dapat digambarkan sebagaimana berikut :

PROSES UTAMA KECAMATAN



P.0 Proses Utama Kecamatan merupakan Core utama dari proses bisnis kecamatan yaitu meliputi :

1. Manajerial

Dalam core manajerial terdapat 3 bagian penting dalam prosesnya meliputi

- *Pelayanan administrasi Umum dan Keuangan* , merupakan bagian proses bisnis yang mencakup tentang administrasi umum seperti surat menyurat, urusan kepegawaian dan lain-lain. Serta Keuangan mencakup proses urusan gaji, pencairan keuangan seperti kebutuhan alat kantor, listrik dan lain-lain
- *Evaluasi dan Pelapoan*, merupakan bagian proses bisnis yang mencakup kinnerja dan realisasi dari program dan kegiatan yang diajalankan dari DPA Perangkat Daerah, seperti tingkat realisasi keuangan atau tingkat kinerja dari capaian target masing-masing program/kegiatan
- *Penyusunan Dokumen Perencanaan*, yaitu proses bisnis yang mencakup kegiatan perencanaan keuangan atau kinerja yang akan dilaksanakan Perangkat daerah selama 1 tahun ke depan seperti

pembuatan Renstra, Rencana Kinerja dan Rencana Keuangan Anggaran Perangkat Daerah

2. Core Utama

- *Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan Monitoring dan Evaluasi*, merupakan bagian utama dari proses bisnis Kecamatan yang merujuk dari tugas kecamatan seperti pembinaan kepada perangkat desa, sebagai fasilitator kegiatan serta monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan instansi dibawahnya / desa.
- *Pelayanan*, merupakan bagian proses bisnis yang mencakup kegiatan pelayanan kepada masyarakat seperti pembuatan KTP, KK atau urusan kependudukan

3. Core Lainnya

- Core lainnya merupakan faktor yang dapat mempengaruhi Core Utama dari proses bisnis Kecamatan yaitu Perubahan Perundang-Undangan dan iklim politik

1.5.1 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Berdasarkan surat Inspektorat Kabupaten Jombang Nomor X.700/527/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Tahun 2024, nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Mojoagung Tahun 2024 adalah 73,48 termasuk kategori BB dengan predikat “Sangat Baik” dengan catatan hasil evaluasi sebagai berikut :

A. Kondisi Evaluasi

1. Evaluasi atas perencanaan kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja dengan nilai 23,34 dari bobot 30% atau dengan capaian 77,79% (BB) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%) namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain : **(2.03.04)**

- a) Berdasarkan hasil evaluasi LKE diketahui bahwa telah terdapat Keputusan Camat Mojoagung Nomor 188/15/415.59/2024 tentang pemberian Penghargaan dan Hukuman atas Kedisiplinan Pegawai dan Capaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang yang menyajikan capaian kinerja sebagai indikator penilaian. Namun berdasarkan hasil perhitungan penilaian, capaian atas target kinerja belum dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan (reward)

- b) Berdasarkan hasil evaluasi lapangan, diketahui bahwa sebagian kecil pegawai terlibat dalam perencanaan kinerja namun belum terdapat pemahaman akan perencanaan yang dilakukan dengan semangat pemecahan masalah riil serta peran individu dalam mencapai tujuan organisasi.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja atas dengan nilai 22,72 dari bobot 30% atau dengan capaian 75,75% (B) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%), namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain: (2.03.04) :

- a) Berdasarkan hasil evaluasi LKE, diketahui bahwa telah didapati mekanisme/SOP terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan, namun dalam SOP tersebut belum disajikan secara jelas waktu pengumpulan setiap dokumen data kinerja.
- b) Berdasarkan hasil evaluasi lapangan, diketahui bahwa sebagian pegawai belum memahami bahwa pengukuran dan evaluasi kinerja perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan periode berikutnya dan juga dalam melakukan pengukuran kinerja individu perlu mempertimbangkan capaian kinerja organisasi serta belum dilakukan pemberian penghargaan dan sanksi.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 8,33 dari bobot 15% atau dengan capaian 55,50% (C) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (50%-75%) , dan terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah : (2.03.04)

- a) Berdasarkan hasil evaluasi LKE, diketahui bahwa Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, namun belum seluruh upaya nyata yang disajikan mendukung permasalahan yang ditemui dalam proses pencapaian target.
- b) Berdasarkan hasil evaluasi lapangan, diketahui bahwa dalam upaya peningkatan kinerja telah dibuat inovasi yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat atau pemberi layanan namun sebagian besar pegawai belum memahami hal tersebut serta laporan kinerja belum menggambarkan adanya perbaikan dari periode sebelumnya. (2.03.04).

4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan nilai 19,09 dari bobot 25% atau dengan capaian 76,38% (B) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%). Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti, namun belum dimanfaatkan dengan maksimal dalam upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja (peningkatan capaian kinerja outcome) serta mendukung dalam proses efektivitas dan efisiensi kinerja. **(2.03.04)**

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Camat Mojoagung Kabupaten Jombang, agar :

- 1) Pada saat penyusunan dokumen perencanaan kinerja selanjutnya agar memperhitungkan capaian kinerja dalam pemberian penghargaan (reward)
- 2) Meningkatkan pemahaman pegawai melalui keterlibatan "secara aktif" seluruh pegawai dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai dengan level paling operasional.
- 3) Melakukan koreksi pada SOP pengumpulan data kinerja agar menyajikan waktu pengumpulan atas setiap dokumen data kinerja.
- 4) Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi untuk merencanakan periode selanjutnya. Selain itu, penting untuk memperhatikan kinerja organisasi di atasnya agar dapat diketahui apakah kinerja individu/ Perangkat Daerah telah cukup menunjang kinerja organisasi di atasnya.
- 5) Melakukan pencermatan terhadap faktor penghambat/ permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja serta upaya nyata yang diambil dalam pemecahan masalah dalam laporan kinerja yang mana harus terdapat kesinambungan di antara keduanya.
- 6) Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada. Laporan kinerja perlu disusun melalui proses analisis yang tepat dan sungguh-sungguh melihat keberhasilan dan kegagalan melalui data yang dapat

dipertanggungjawabkan sehingga setiap periodenya selalu ada perbaikan dan peningkatan kinerja.

- 7) Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target dan capaian kinerja (outcome) berikutnya.

BAB II

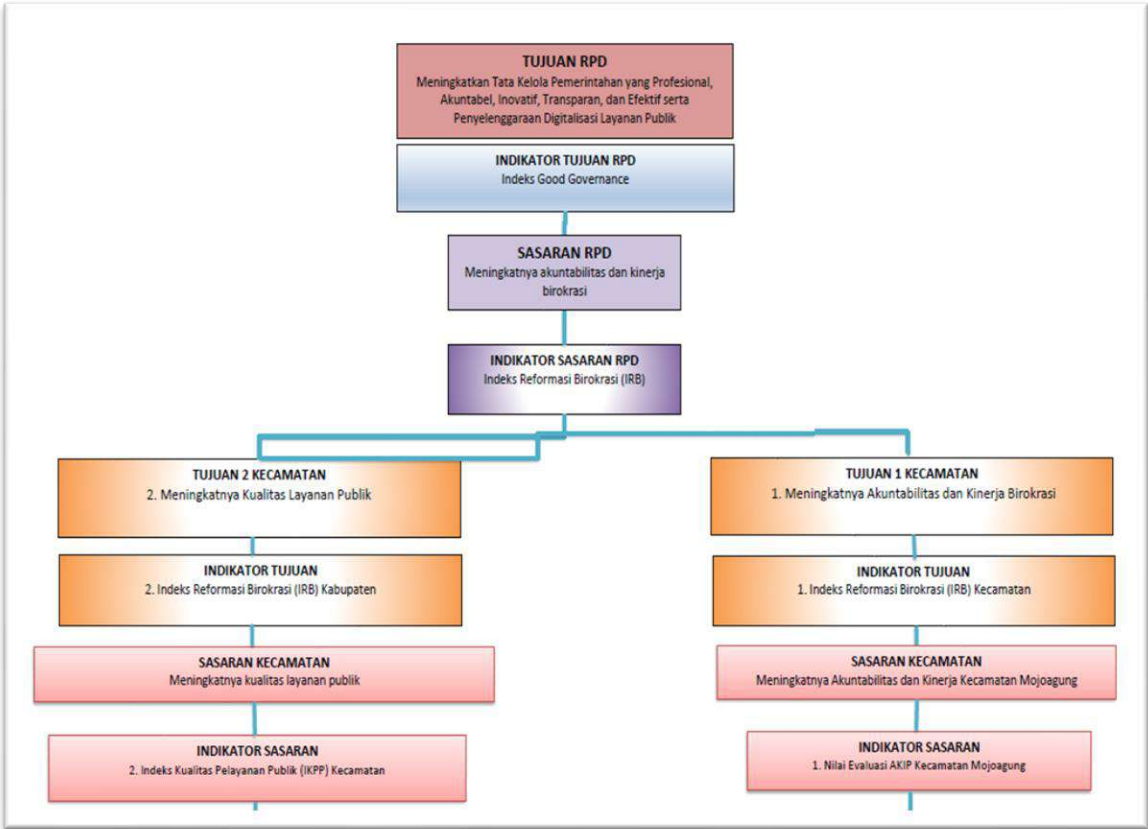
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja

2.1.1 Rencana Strategis

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Mojoagung memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Jombang karena Perubahan Renstra Kecamatan Mojoagung disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Jombang. Berikut ini akan digambarkan dalam bagan tentang keterkaitan Perubahan Renstra Kecamatan Mojoagung dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Jombang.

Gambar 2.1 Keterkaitan RPD Kabupaten Jombang Dengan Renstra Kecamatan Mojoagung Tahun 2024 - 2026



Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat. Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk

memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Mojoagung pada periode Tahun 2024 - 2026.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Perubahan Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen OPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Renstra Kecamatan Mojoagung juga memiliki keterkaitan dengan Renja Kecamatan Mojoagung. Rencana pada Renstra setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Renja dan penyusunan program/ kegiatan yang ada pada Renja harus tetap mengacu pada Renstra.

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan:
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Subkegiatan:
 1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan:
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Subkegiatan:
 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan:
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Subkegiatan:
 1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kegiatan:
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Subkegiatan:
 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kegiatan:
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan:

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2.1.2 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Rencana Kerja tahun 2024 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024. Rencana Kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024. Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Renja 2024, adalah:

2.2 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Mojoagung atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersagkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Mojoagung Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Mojoagung Tahun 2024 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah: sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Mojoagung untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan:

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 060.1/117/415.01/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUCHTAR, S.IP., M.Si**
Jabatan : **CAMAT MOJOAGUNG**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T**
Jabatan : **Pj. BUPATI JOMBANG**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.

Jombang, 23 Januari 2024
PIHAK PERTAMA
Camat Mojoagung

Ditandatangani secara elektronik



MUCHTAR, S.IP., M.Si.
NIP. 197206211998031005



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KODE UNIT : 415.58

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojoagung	73,50 (BB)
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojoagung	8,7



Balai
Sertifikasi
Elektronik

KODE UNIT : 415.58

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya Capaian kinerja aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	3.147.099.444
2.	Meningkatnya Penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Paten Kecamatan Mojoagung	93	9.022.000
3.	Meningkatnya Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	86.292.400
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
4.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	100%	9.800.000
5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Laporan Realisasi APB Desa tepat waktu	100%	15.498.500
6.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	43.978.200
JUMLAH					3.311.690.544

Jombang, 23 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

Camat Mojoagung

Ditandatangani secara elektronik



MUCHTAR, S.IP., M.Si.

NIP. 197206211998031005

PIHAK KEDUA

Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 000.8.6.3/538/415.01/2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

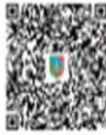
Nama : **MUCHTAR, S.IP., M.Si**
Jabatan : **CAMAT MOJOAGUNG**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM**
Jabatan : **Pj. BUPATI JOMBANG**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

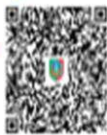
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 9 September 2024
PIHAK PERTAMA
Camat Mojoagung

Ditandatar  lektronik

MUCHTAR, S.IP., M.Si.
NIP. 197206211998031005

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang

Ditandatar  lektronik

Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KODE UNIT : 415.59

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojoagung	73,50 (BB)
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojoagung	8,7



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KODE UNIT : 415.59

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya Capaian kinerja aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	3.012.572.307
2.	Meningkatnya Penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Paten Kecamatan Mojoagung	93	9.022.000
3.	Meningkatnya Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	86.292.400
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
4.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	100%	9.800.000
5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Laporan Realisasi APB Desa tepat waktu	100%	15.498.500
6.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	43.978.200
JUMLAH					3.177.163.407



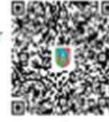
Balai
Sertifikasi
Elektronik

KODE UNIT : 415.59

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Jombang, 9 September 2024
PIHAK PERTAMA
Camat Mojoagung

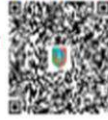
Ditandatangani elektronik



MUCHTAR, S.IP., M.Si.
NIP. 197206211998031005

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani elektronik



Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM



Balai
Sertifikasi
Elektronik

KODE UNIT : 415.59

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN MOJOAGUNG TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Mojoagung	Nilai Evaluasi AKIP	NILAI	73,5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Rp. 3.147.099.444,00	Rp. 3.012.572.306,00
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojoagung	NILAI	8,7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Paten Kecamatan	Rp. 9.022.000,00	Rp. 9.022.000,00
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	Rp. 86.292.400,00	Rp. 86.292.400,00
						Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti		
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang	Rp. 9.800.000,00	Rp. 9.800.000,00

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
						ditindaklanjuti instansi terkait		
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	Rp. 15.498.500,00	Rp. 15.498.500,00
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	Rp. 43.978.200,00	Rp. 43.978.200,00

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Mojoagung dengan Pemerintah, ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama

No	Kinerja Utama	Indikator kinerja utama	Rumus penghitungan/formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Mojoagung	Nilai Evaluasi SAKIP	- Nilai Evaluasi Sakip tahun n	Hasil Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP	Camat Mojoagung
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojoagung	- $(1,25 \times \text{nilai IKM}) + \text{nilai IPP tahun n}$	Hasil survey penilaian IKM dan IPP	Camat Mojoagung

Untuk menunjang tercapainya Indikator Tujuan Utama (IKU) Kecamatan Mojoagung telah dirumuskan Indikator Program, Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Target
Indikator dan
Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	Realisasi	Capaian (%)
1	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Meningkatnya Capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100%
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	100%
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100%
			2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang	18 orang	100%
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Mojoagung	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	2 paket	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	Realisasi	Capaian (%)
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	100%
	Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
	Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
	3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100%
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	100%
	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 unit	40 unit	100%
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan: 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	24 laporan	100%
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	24 laporan	100%
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	13 unit	100%
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	5 unit	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	Realisasi	Capaian (%)
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 unit	22 unit	100%
2	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	93	90,35	97,15%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100%
3.	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan	5 laporan	100%
			Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 laporan	4 laporan	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	100 orang	100%
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 laporan	4 laporan	100%
4.	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%
	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	100%	100%	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	Realisasi	Capaian (%)
	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Negara Republik Indonesia.			
5.	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	18 desa	18 desa	100%
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36 dokumen	36 dokumen	100%
6.	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	36 lembaga	36 lembaga	100%
			Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	18 Desa	18 Desa	100%
	SUB KEGIATAN : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	108 lembaga	108 lembaga	100%
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	100%

Tabel 2.6
 Program, Sasaran Program, Indikator Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan, Sasaran Sub
 Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan
 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
1	Program: Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota	Meningkatnya Capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd -----x100 jumlah pegawai
1.1	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD
1.1.1	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun tahun n
1.1.2	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun tahun n

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu -----x100 Pencairan gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan
			2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah Laporan keuangan yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Mojoagung yang di fasilitasi	20 orang	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Mojoagung yang di fasilitasi tahun n
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD tahun n
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun n
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Mojoagung	100%	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian PD -----x100 Jumlah Laporan administrasi kepegawaian yang ditargetkan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan tahun n
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran -----x100 Pelayanan administrasi perkantoran yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tahun n
	Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tahun n
	Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tahun n
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tahun n
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan Tahun n
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun n

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana -----x100 Pengadaan sarana dan prasana yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Tahun n
\	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah -----x100 Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan
	Sub Kegiatan: 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tahun n
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tahun n
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik -----x100 Jumlah barang milik daerah yang dipelihara
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya tahun n

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Tahun n
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Tahun n
2	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	93	Nilai Paten Kecamatan Tahun n
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	$\frac{\text{Jumlah pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar}}{\text{Jumlah pelayanan terpadu (PATEN)}} \times 100\%$
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun n
3	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan kegiatan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang direncanakan}} \times 100\%$

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti -----x100% Jumlah rekomendasi Forkopimcam
	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya tahun n
			Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam tahun n
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa tahun n
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan tahun n

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
4.	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti ke Instansi Terkait ----- x100% Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada
	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait -----x100% Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang cepat dan efisienPerundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	Jumlah dokumen Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang cepat dan efisien tahun n
5.	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	Jumlah Laporan Realisasi APB Desa tepat waktu ----- X100% Jumlah Laporan Realisasi APB Desa

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	18 Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap tahun n
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36 dokumen	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa tahun n
6.	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	Jumlah desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif -----x100% Jumlah desa
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	36 lembaga	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina tahun n
			Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	18 Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes tahun n
	SUB KEGIATAN Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	108 lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa tahun n

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun n

BAB III

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Mojoagung sebagai SKPD pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Untuk mempermudah dalam interpretasi pencapaian indikator kinerja utama, digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

NO	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1	>110% - 120%	: Istimewa (Sangat Berhasil)
2	>90% - 110%	: Baik (Berhasil)
3	>70% - 80%	: Butuh Perbaikan (Cukup)
4	>50% - 70%	: Kurang
5	>0% - 50%	: Sangat Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Mojoagung memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok

indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2024 - 2026 serta Renja Perubahan 2024.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Mojoagung diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2024, Kecamatan Mojoagung memiliki 2 (Dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Mojoagung tahun 2024 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa pembanding, meliputi:

3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mojoagung Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tujuan : **1.** Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja birokrasi
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Mojoagung Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Mojoagung	Nilai Evaluasi SAKIP	73,5	73,48	99,97%
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojoagung	8,7	8,3	95,40%
Rata-Rata Capaian IKU				97,69 %

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diketahui bahwa capaian indikator IKU Kecamatan Mojoagung Tahun 2024 telah tercapai sebesar 97,69%.

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 73,5 telah tercapai 73,48 dengan tingkat capaian 99,97% berdasarkan surat No. X.700/527/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Tahun 2024.
2. IKPP (Indeks Kualitas Pelayanan Publik) Kecamatan Mojoagung ditargetkan 8,7 tercapai 8,3 dengan tingkat capaian 95,40%. Capaian nilai IKPP Tahun 2024 menurun dari capaian tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai IKM dan IPP Kecamatan Mojoagung. Untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKPP tahun 2024 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan kompetensi petugas berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

Untuk mencapai kinerja tersebut harus dilandasi semangat sesuai pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas diperoleh data dan informasi, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Mojoagung Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1.	Melebihi/ melampaui target	-
2.	Sesuai target	-
3.	Tidak mencapai target	97,69%

Dari tabel diatas, terlihat bahwa tingkat pencapaian indikator kinerja utama belum mencerminkan keberhasilan dalam pelaksanaannya meskipun masih masuk dalam kategori **BAIK (BERHASIL)**.

Selanjutnya sebagai pendukung keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mojoagung Tahun 2024 berikut disajikan capaian kinerja masing-masing kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Mojoagung	Nilai Evaluasi SAKIP	73,5	73,48	99,97%
1	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKPP (Indeks Kualitas Pelayanan Publik) Kecamatan Mojoagung	8,7	8,3	95,40%
2	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	93	90,35	97,15%
3	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%
5	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%
6	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Kecamatan Mojoagung sebesar 97,69%. Artinya kinerja Kecamatan Mojoagung tercapai dengan BAIK. Adapun analisis capaian program tahun anggaran 2024 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja pada program tersebut adalah persentase Capaian kinerja

Aparatur dengan target sebesar 100%. Tahun 2024 telah tercapai sesuai target. Hal ini dibuktikan dengan rata rata capaian kinerja masing masing pegawai yang diperoleh dari Monev Rencana Aksi tiap tribulan dan Pengukuran Kinerja yang dikumpulkan tiap tribulan sebesar 100%.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Indikator kinerja pada program diatas adalah Nilai PATEN Kecamatan. Target sebesar 93 dapat tercapai pada tahun 2024 sebesar 90,35 dengan capaian target 97,15%.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator kinerja yang pertama pada program tersebut adalah Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan. Target sebesar 100% telah tercapai 100%. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelaksanaan kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke 79 pada bulan Agustus dengan berbagai kegiatan seperti Upacara detik detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Tasyakuran Kemerdekaan yang dilaksanakan di Kecamatan Mojoagung dan juga kegiatan social budaya seperti Monitoring Bansos dan Hibah maupun kegiatan lainnya.

Indikator Kinerja yang kedua yaitu Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti. Target sebesar 100% telah tercapai sesuai dengan target. Rekomendasi forkopimcam ditindaklanjuti sesuai dengan hasil koordinasi tiap tribulan yang dilaksanakan di Kecamatan Mojoagung.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator kinerja pada program adalah Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat Laporan trantibum tiap bulan yang ditujukan ke Dinas terkait seperti Satpol PP. Adapun target telah tercapai sebesar 100%.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator kinerja pada pada program adalah yang pertama Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu. Hal ini dibuktikan dengan laporan rekapitulasi pertanggungjawaban realisasi APBDEs Semester I dan Laporan Realisasi Akhir Tahun APBDes yang disampaikan oleh desa secara tepat waktu. Target sebesar 100% telah tercapai dikarenakan perdes LRA harus dilaporkan ke Camat untuk selanjutnya diteruskan ke Bupati.

6. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan

Indikator kinerja program tersebut yang pertama yaitu Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif. Lembaga / Badan Usaha pemberdayaan desa yang diukur adalah TP PKK Desa dan BUMDes. Kegiatan pembinaan sebanyak 36 lembaga dilaksanakan secara rutin dan berkala. Hal ini dibuktikan dengan adanya

laporan kegiatan pembinaan PKK dan Laporan keuangan BUMDes masing-masing desa.

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 2 tahun terakhir

Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Mojoagung

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian IKU
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023			Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%
			Target	Realisasi								Target	Realisasi	
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Mojoagung	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	72	72	100,00 %	72,5	73,12	100,86%	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Mojoagung	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojoagung	Nilai	73,5	73,48	99,97 %
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Mojoagung	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai	91,50	97,23	106,26 %	93,50	98,15	104,9 %	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojoagung	Nilai	8,7	8,3	95,40 %
	Nilai IPP (Indeks Pelayanan Publik)	Nilai	3,75	3,4	90,67 %	3,45	3,74	108,41%						
	Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindak lanjuti oleh instansi terkait	Persen	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%						
	Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	Persen	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%						
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	Persen	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%						
RATA- RATA CAPAIAN KINERJA					99,49%			102,37%						97,69 %

Dari tabel diatas pada Perubahan Renstra Tahun 2018 – 2023 dengan memakai IKU 2 (dua) sasaran maka terjadi peningkatan Capaian kinerja dari setiap tahunnya dimulai dari tahun 2022 persentase sebesar 99,49% ada kenaikan poin sampai dengan tahun 2023 sebesar **3,32**. Sehingga capaian kinerja pada Tahun 2023 adalah sebesar **102,37%**. Hal ini bisa terjadi dikarenakan ada beberapa faktor seperti faktor peningkatan skill SDM, Faktor perubahan target kinerja

dan juga terkait dengan fasilitas sarana prasarana yang mendukung pelayanan publik kepada masyarakat. Tetapi diharapkan untuk tahun-tahun kedepannya, IKU ini dapat menjadi tolak ukur adanya peningkatan akuntabilitas kinerja unit organisasi yakni Kecamatan Mojoagung, utamanya dalam proses pelayanan kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya hasil survey kepuasan masyarakat.

Sedangkan pada Renstra Tahun 2024 – 2026 dengan menggunakan indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak dua di tahun 2024 mengalami penurunan capaian kinerja dengan persentase sebanyak **4,68%**. Penurunan capaian kinerja yang signifikan terjadi pada indikator IKPP (Indeks Kualitas Pelayanan Publik) Kecamatan Mojoagung yang pada tahun ini hanya tercapai sebanyak 8,3 dari target 8,7. Hal ini dikarenakan pada IKM dan IPP Kecamatan Mojoagung juga terjadi penurunan nilai sehingga mempengaruhi hasil akhir nilai IKPP Kecamatan Mojoagung.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2022 – 2024 sebagai berikut :

1. Nilai Evaluasi AKIP dari tahun 2022 mengalami peningkatan kinerja. Pada tahun 2022-2023 meningkat 1,12 sedangkan pada tahun 2023 – 2024 mengalami peningkatan sebanyak 0,36. Kenaikan pada tahun 2024 dapat disimpulkan kinerja lebih baik setiap tahunnya.
2. IKM Kecamatan Mojoagung dari tahun 2022-2023 meningkat 0,92. Kenaikan realisasi capaian IKM dapat disimpulkan bahwa kinerja lebih baik setiap tahunnya.
3. IPP Kecamatan Mojoagung dari tahun 2022-2023 meningkat drastis menjadi 0,34. Dapat disimpulkan bahwa kinerja lebih baik setiap tahunnya. Peningkatan nilai IPP dan IKM menjadikan Apresiasi untuk Kecamatan Mojoagung menjadi Pemenang Kategori Pelayanan Terbaik tingkat Kecamatan se Kabupaten Jombang Tahun 2023.
4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait belum dapat dibandingkan karena pada tahun 2021-2023 belum dijadikan indikator sasaran strategis dan belum ada basic data yang akurat.
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu belum dapat dibandingkan karena pada tahun 2021-2023 belum dijadikan indikator sasaran strategis dan belum ada basic data yang

akurat.

- 6.** Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu belum dapat dibandingkan karena pada tahun 2021-2023 belum dijadikan indikator sasaran strategis dan belum ada basic data yang akurat.

Sedangkan realisasi kinerja pada tahun 2024 yang menggunakan Renstra Tahun 2024 – 2026 dengan capaian 97,69% belum bisa diperbandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan perbedaan Indikator Kinerja Utama dan juga perbedaan Sasaran Strategis.

Tabel 3.5

Analisis Pencapaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2023 (Perubahan Renstra tahun 2018 – 2023)

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Capaian (%)	2023	
				TARGET	REALISASI
1	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	5 laporan
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100%
		2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Mojoagung yang di fasilitasi	20 orang	20 orang	20 orang
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 paket	32 paket	32 paket
	Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	6 paket
	Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23 paket	23 paket	23 paket
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Capaian (%)	2023	
				TARGET	REALISASI
		Disediakan			
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	4 laporan
	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 unit	25 unit	25 unit
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan: 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	24 laporan	24 laporan
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	24 laporan	24 laporan
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	13 unit	13 unit
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	5 unit	5 unit
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	12 unit	12 unit
2	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	112,89%	82	92,57
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
3	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Capaian (%)	2023	
				TARGET	REALISASI
	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	2 laporan	2 laporan	2 laporan
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi Forkopimcam	4 laporan	4 laporan	4 laporan
4	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	100%
	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan
	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	12 laporan	12 laporan
5	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100%	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	36 dokumen	36 dokumen	36 dokumen
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36 dokumen	36 dokumen	36 dokumen
6	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100%	100%
		2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	36 lembaga	36 lembaga	36 lembaga
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Raperdes Perubahan APB Desa yang tepat waktu	36 dokumen	36 dokumen	36 dokumen
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	36 lembaga	36 lembaga	36 lembaga
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Capaian (%)	2023	
				TARGET	REALISASI
		Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

Analisis Pencapaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2024 (Renstra tahun 2024 – 2026)

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Capaian (%)	2023	
				TARGET	REALISASI
1	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	5 laporan
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100%
		2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang	18 orang	18 orang
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Mojoagung	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	2 paket	100%
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	3 paket
	Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Capaian (%)	2023	
				TARGET	REALISASI
	Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23 paket	23 paket	23 paket
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	4 laporan
	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 unit	40 unit	40 unit
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan: 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	24 laporan	24 laporan
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	24 laporan	24 laporan
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	13 unit	13 unit
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	5 unit	5 unit
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	12 unit	12 unit
2	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	93	90,35	97,15%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	12 laporan	12 laporan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Capaian (%)	2023	
				TARGET	REALISASI
	Wilayah Kecamatan	Kecamatan			
3	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan	5 laporan	100%
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 laporan	4 laporan	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	100 orang	100%
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 laporan	4 laporan	100%
4	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%
	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	100%	100%	100%
5	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	18 desa	18 desa	100%
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36 dokumen	36 dokumen	100%
6	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	36 lembaga	36 lembaga	100%
		Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	18 Desa	18 Desa	100%
	SUB KEGIATAN : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	108 lembaga	108 lembaga	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Capaian (%)	2023	
				TARGET	REALISASI
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	100%

3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Dokumen Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Akhir Renstra	Persentase realisasi target sasaran Renstra sampai tahun 2024
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Mojoagung	Nilai Evaluasi SAKIP	73,5	73,48	99,97%
Meningkatnya kualitas layanan publik	IKPP (Indeks Kualitas Pelayanan Publik) Kecamatan Mojoagung	8,52	8,3	97,42%
RATA-RATA TINGKAT KEMAJUAN				98,69%

Tahun 2024 merupakan tahun awal periode Renstra 2024 - 2026 dimana ada perubahan indikator kinerja sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. Sasaran strategis kecamatan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan indikator kinerja nilai evaluasi AKIP Kecamatan Mojoagung.
2. Meningkatkan kualitas layanan public Kecamatan Mojoagung dengan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan penjabaran diatas.

Pada tahun 2024 target sasaran strategis renstra dapat tercapai dengan rata – rata capaian kinerja 98,69%.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP belum mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 99,97% target periode akhir renstra 73,50 pada tahun 2024 telah tercapai 73,48.
2. IKPP (Indeks Kualitas Pelayanan Publik) Kecamatan Mojoagung pada tahun pertama renstra dengan target akhir 8,52 telah tercapai nilai 8,3 dengan tingkat kemajuan 97,42%.

3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level Nasional/ Internasional.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi SAKIP dan IKPP Kec. Mojoagung dengan Skala Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi tahun n	Realisasi Kabupaten	Realiasi Provinsi	Realisasi Nasional	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Mojoagung	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojoagung	73,48	72,33	84,19	64,23	Indikator nasional adalah nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional
Meningkatnya kualitas layanan publik	IKPP (Indeks Kualitas Pelayanan Publik) Kecamatan Mojoagung	8,3	-	-		KemenpanRB belum merilis hasil rata-rata IKPP nasional

Sumber: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tren-kenaikan-sakip-selama-10-tahun-menteri-panrb-korelasi-positif-akuntabilitas-kinerja-dengan-akselerasi-pembangunan-dan-pengentasan-kemiskinan>

Berdasarkan Tabel diatas didapati Capaian Kinerja Kecamatan Mojoagung tahun 2024 dibandingkan dengan Capaian kinerja tahun 2024 di level Kabupaten, Provinsi dan Nasional nilainya sudah mendekati dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi Nilai Evaluasi AKIP telah tercapai 73,48 melebihi realisasi nasional yaitu nilai akuntabilitas kinerja nasional 64,23 dengan selisih 9,25 poin. Apabila dibandingkan dengan provinsi masih rendah dengan selisih -10,71, sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi kabupaten lebih tinggi 1,15.
2. IKPP Kecamatan Mojoagung tercapai sebesar 8,3 sedangkan IKPP Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur dan realisasi nasional belum dirilis.

3.1.5 Analisis atas realisasi kinerja

Secara umum berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang tercermin dengan terlampauinya target yang telah ditetapkan berdasarkan indikator kinerja, dengan persentase realisasi Capaian keseluruhan indikator kinerja utama sebesar 97,69% dan Kecamatan Mojoagung pada Tahun 2024 mendapat predikat untuk Capaian Organisasi **“BAIK”**.

3.1.5.1 Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

1. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mengisyaratkan pentingnya kecamatan dalam pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yakni menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat

daerah dalam kerangka asas desentralisasi.

2. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.
3. Pelayanan non perijinan yaitu cetak KK dan KTP el sudah bisa dilayani di Kantor Kecamatan Mojoagung. Hal ini sangat membantu menunjang pelayanan kepada masyarakat karena selama ini cetak KK dan KTP el hanya bisa dilakukan di Dispendukcapil. Dan juga sesuai dengan motto Kecamatan Mojoagung yaitu CERIA (Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif, Akuntabel).
4. Dengan dicanangkannya Zona Integritas yang berbasis kepada WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) di Kecamatan Mojoagung semakin menambah komitmen Kecamatan Mojoagung untuk melayani masyarakat. Inovasi-inovasi dalam Zona Integritas dimanfaatkan sebagai peningkatan kualitas SDM pelayanan dan juga sarana prasarana yang menunjang pelayanan di lingkup Kecamatan Mojoagung. Zona Integritas sebagai Komitmen Bersama antara seluruh aparatur lingkup Kecamatan Mojoagung baik di kantor kecamatan maupun desa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
5. Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran dan sarana prasarana yang seadanya.
6. Evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara formal maupun informal.
7. Sinergitas yang baik antara Camat Mojoagung, Kepala UPTD/B Se-Kecamatan, Kepala Desa serta stakeholder lain dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Mojoagung untuk mencapai tujuan organisasi.

3.1.5.2 Faktor Penghambat/Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja

1. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam implementasi beberapa kebijakan/peraturan yang ada di masing-masing

stakeholder.

2. Masih adanya tumpang tindih peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
3. Kompetensi SDM aparatur yang kurang memadai.
4. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana pelayanan
5. Masih kurangnya koordinasi antara para kasi dengan desa – desa di wilayah Kecamatan Mojoagung terkait dengan pemenuhan kecukupan data yang diminta baik oleh Kecamatan maupun Kabupaten. Hal ini disebabkan masih minimnya frekuensi kasi untuk terjun langsung ke desa-desa.

3.1.5.3 Rencana Tindak Lanjut

- a. Melaksanakan inventarisasi data yang akurat terkait kebijakan/peraturan perUndangan terkait Pemerintahan Daerah utamanya Kecamatan.
- b. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kepada seluruh stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan/peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasinya.
- c. Pengiriman aparatur Kecamatan dalam pelaksanaan diklat/bimbingan teknis/rakor/seminar dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.
- d. Mengkoordinasikan dengan pihak yang terkait dengan penerbitan regulasi adanya revisi beberapa point pada regulasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat yang kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan terus menjaga komitmen sesuai standar ISO 9001:2015 dan motto pelayanan Mojoagung CERIA (Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif, Akuntabel).
- f. Diinstruksikan kepada para kasi untuk lebih sering terjun ke desa-desa. Disamping menjaga keharmonisan antara Desa dengan kecamatan, selain itu agar kecukupan data-data bisa segera dipenuhi oleh desa.

3.1.5.4 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak

dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni **Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Mojoagung** dan **Meningkatnya kualitas layanan publik Kecamatan Mojoagung**, Kecamatan Mojoagung menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.12
Program, Kegiatan, Anggaran, Outcome/Output Yang Dihasilkan

Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target	Pagu Anggaran	Realisasi	Menunjang/ Kurang	%
2	3	4	5	6	7	8
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	3.012.572.307	2.739.866.972	Sangat Menunjang	90.93%
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	8.757.500	8.757.500	Sangat Menunjang	100%
Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	8.217.500	8.217.500	Sangat Menunjang	100%
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	540.000	540.000	Sangat Menunjang	100%
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	2.597.039.256	2.331.429.424	Sangat Menunjang	89.76%
	2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%		Sangat Menunjang	
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang	2.521.711.256	2.256.101.424	Sangat Menunjang	89.46%
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	75.128.000	75.128.000	Sangat Menunjang	100%
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	200.000	200.000	Sangat Menunjang	100%

Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target	Pagu Anggaran	Realisasi	Menunjang/ Kurang	%
2	3	4	5	6	7	8
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Mojoagung	100 persen	12.000.000	11.994.000	Sangat Menunjang	99.95%
Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	12.000.000	11.994.000	Sangat Menunjang	99.95%
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	102.689.100	96.124.760	Sangat Menunjang	93.6%
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	18.500.000	18.490.000	Sangat Menunjang	99.95%
Sub Kegiatan : 2. 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.594.300	1.594.300	Sangat Menunjang	100%
Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	46.200.000	39.670.000	Sangat Menunjang	85.87%
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	8.718.800	8.718.800	Sangat Menunjang	100%
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	1 dokumen	2.400.000	2.400.000	Sangat Menunjang	100%
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	25.276.000	25.241.660	Sangat Menunjang	99.86%
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	88.919.749	88.660.750	Sangat Menunjang	99.71%
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 unit	88.919.749	88.660.750	Sangat Menunjang	99.71%
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	103.784.552	103.576.138	Sangat Menunjang	99.8%
Sub Kegiatan: 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	31.632.552	31.575.251	Sangat Menunjang	99.84%
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	72.152.000	72.000.887	Sangat Menunjang	99.79%
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	99.382.150	99.324.400	Sangat Menunjang	99.64%

Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target	Pagu Anggaran	Realisasi	Menunjang/ Kurang	%
2	3	4	5	6	7	8
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	55.089.000	55.088.400	Sangat Menunjang	100%
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	27.343.150	27.286.000	Sangat Menunjang	99.79%
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 unit	16.950.000	16.950.000	Sangat Menunjang	98.23%
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	93	9.022.000	9.022.000	Sangat Menunjang	100%
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	9.022.000	9.022.000	Sangat Menunjang	100%
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	9.022.000	9.022.000	Sangat Menunjang	100%
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	86.292.400	86.292.400	Sangat Menunjang	100%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	86.292.400	86.292.400	Sangat Menunjang	100%
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan	86.292.400	86.292.400	Sangat Menunjang	100%
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen			Sangat Menunjang	
Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	42.415.800	42.415.800	Sangat Menunjang	100%
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	43.876.600	43.876.600	Sangat Menunjang	100%
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan Kasus Pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	100%	9.800.000	9.800.000	Sangat Menunjang	100%

Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target	Pagu Anggaran	Realisasi	Menunjang/ Kurang	%
2	3	4	5	6	7	8
	yang ditindaklanjuti instansi terkait					
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	12 kegiatan	9.800.000	9.800.000	Sangat Menunjang	100%
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	9.800.000	9.800.000	Sangat Menunjang	100%
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	15.498.500	15.498.500	Sangat Menunjang	100%
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	18 Desa	15.498.500	15.498.500	Sangat Menunjang	100%
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36 dokumen	15.498.500	15.498.500	Sangat Menunjang	100%
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100%	43.978.200	43.978.200	Sangat Menunjang	100%
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	18 Desa	43.978.200	43.978.200	Sangat Menunjang	100%
	Jumlah Lembaga/ Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	36 lembaga				
Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	108 lembaga	14.451.600	14.451.600	Sangat Menunjang	100%
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	36 lembaga	29.526.600	29.526.600	Sangat Menunjang	100%

Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target	Pagu Anggaran	Realisasi	Menunjang/ Kurang	%
2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH			3.177.163.407	2.904.458.072		91,40%

7. Realisasi Anggaran

3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran

Secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran Kecamatan Mojoagung Tahun Anggaran 2024 tersaji dalam tabel berikut :

TABEL 3.8
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024

Sasaran Strategis /Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Mojoagung	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojoagung	73,5	73,48	99,97%	3.012.572.307	2.739.866.972	90.94%
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	3.012.572.307	2.739.866.972	90,94%
Meningkatnya kualitas layanan publik Kecamatan Mojoagung	IKPP (Indeks Kualitas Pelayanan Publik) Kecamatan Mojoagung	8,7	8,3	95,40%	164.591.100	164.591.100	100%
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	93	90,35	97,15%	9.022.000	9.022.000	100%
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%	86.292.400	86.292.400	100%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%			100%
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%	9.800.000	9.800.000	
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%	15.498.500	15.498.500	100%
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%	43.978.200	43.978.200	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN				97,69%	3.177.163.407	2.904.458.072	91,40%

Namun demikian bukan berarti tidak ada kendala ataupun hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut. Adapun capaian serapan tahun anggaran 2024 sebesar 91,40%. Capaian anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan tahun lalu terutama pada Anggaran Rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor seperti pada Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang memiliki Silpa paling besar. Faktor tersebut antara lain adanya pegawai yang memasuki Masa Pensiun dan juga adanya pegawai yang tersangkut kasus hukum.

3.2.2 Efisiensi penggunaan sumber daya

Kecamatan Mojoagung sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra 2024 - 2026 Kecamatan Mojoagung yakni: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi dan Meningkatnya Kualitas Layanan Publik, sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Rumus yang digunakan untuk mencari tingkat efisiensi adalah capaian kinerja dikurangi ketersediaan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat terlaksana dengan efisien yaitu penggunaan sumber daya khususnya anggaran seminimal mungkin dengan hasil kinerja yang berdaya guna tercapai sesuai yang telah direncanakan.

Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kecamatan Mojoagung melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumberdaya maupun sumberdana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Mojoagung langsung memberi tanggungjawab kepada seksi yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut berusaha dengan mengedepankan prinsip:

3.2.2.1.1 Transparan

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi utamanya bidang pelayanan secara benar, dan tidak diskriminatif dengan tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3.2.2.1.2 Responsif

Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.

3.2.2.1.3 Efisien

Dalam pelaksanaan tugas mengarah kepada penggunaan sumberdaya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang maksimal kepada publik.

3.2.2.1.4 Efektif

Merupakan kemampuan mencapai target berdasarkan sumberdaya yang ada dengan cara atau proses yang paling optimal.

3.2.2.1.5 Akuntabel

Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

3.2.2.1.6 Terukur

Yakni penetapan target kinerja yang akan dicapai berikut cara untuk mencapainya.

Selanjutnya untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Kecamatan Mojoagung melaksanakan setiap kinerjanya dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang tercapai sesuai target. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan serta penyesuaian anggaran pada beberapa kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Mojoagung	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojoagung	99,97%	90.94%	99,97%
1.	Program: Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	90,94%	100%
2.	Meningkatnya kualitas layanan publik Kecamatan Mojoagung	IKPP (Indeks Kualitas Pelayanan Publik) Kecamatan Mojoagung	95,40%	100%	95,40%
2	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	97,15%	100%	97,15%
3	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%		100%
5	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%
	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%
6	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Mojoagung	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojoagung	99,97%	90.94%	99,97%
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	90,94%	100%
TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA			97,69%	91,40%	6,29

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat Efisiensi Sumber Daya dari Capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar 6,29. Hasil tersebut bisa dilihat dari Capaian Kinerja yang lebih besar dari realisasi anggaran.

Selain itu, Sumber daya manusia juga merupakan salah satu aset dari sebuah organisasi, baik institusi pemerintah maupun swasta. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Tingkat efisiensi hasil Capaian indikator kinerja terhadap ketersediaan sumber daya manusia di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11

Efisiensi Penggunaan SDM Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang

Tahun 2024

No	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2024			Sumber Daya Manusia 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Kebutuhan SDM (ABK)	Ketersediaan SDM	% Ketersediaan SDM
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Mojoagung	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojoagung	73,5	73,48	99,97%	16	6	37,5%
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	16	6	37,5%
2	Meningkatnya kualitas layanan publik Kecamatan Mojoagung	IKPP (Indeks Kualitas Pelayanan Publik) Kecamatan Mojoagung	8,7	8,3	95,40%	27	11	40,74%
2.	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	93	90,35	97,15%	6	3	50%
3.	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%	4	2	50%
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%			
4	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%	9	3	33,3%
5	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%	4	1	25%
6.	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%	4	2	50%
PERSENTASE CAPAIAN KINERJA RATA-RATA					97,69%			39,12%
TINGKAT EFISIENSI SDM						58,57 (Efisiensi Tercapai)		

Sumber : Anjab ABK Kecamatan Mojoagung Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia pada kisaran 58,57 dalam pencapaian indikator kinerja Kecamatan Mojoagung.

Kebutuhan SDM sesuai ANJAB ABK tahun 2024 Kecamatan Mojoagung total sebanyak 47 orang, akan tetapi jumlah pegawai Kecamatan Mojoagung pada Tahun 2024 hanya sebanyak 17 orang. Meskipun jumlah pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan, realisasi capaian kinerja Kecamatan Mojoagung melampaui target sebesar 97,69%.

Selain itu, Sarana dan prasarana juga merupakan salah satu aset dari sebuah organisasi, baik institusi pemerintah maupun swasta. Pemenuhan sarana dan prasarana dalam kebutuhan organisasi juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, sarana dan prasarana yang terpenuhi dapat meningkatkan kinerja dari Sumber Daya Manusia tersebut sehingga target kinerja organisasi bisa terpenuhi dan pelayanan kepada masyarakat terutama dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tingkat efisiensi hasil Capaian indikator kinerja terhadap ketersediaan sarana dan prasarana di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Ketersediaan sarana dan prasarana

Sarana dan Prasarana	Hasil Rekonsiliasi 2024	Usulan Standard Kebutuhan	% ketersediaan sarana dan prasarana
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1	100%
Pompa Air	1	1	100%
Station Wagon	1	1	100%
Pick Up	1	1	100%
Sepeda Motor	40	40	100%
Lemari Kayu	2	2	100%
Rak Besi	3	6	50%
Rak Kayu	3	3	100%
Filing Cabinet Besi	8	8	100%
Lemari Kaca (arsip)	3	5	60%
CCTV - Camera Control Television System	1	1	100%
Papan Visual/Papan Nama	2	2	100%
Mesin Absensi	1	1	100%
LCD Proyektor/ Infocus	2	2	100%
Focusing Screen.Layar LCD Projector	2	2	100%
Papan Nama Instansi	2	2	100%
Papan Pengumuman	1	1	100%
Alat Kantor Lainnya (rangka besi pasang banner)	1	1	50%
Meja Kerja Kantor Kayu	3	3	100%
Kursi Besi/Metal Panjang (tunggu)	15	15	100%
Meja Rapat	7	7	100%
Tempat Tidur Kayu	1	1	100%
Meja Resepsionis	2	2	100%
Meja Panjang	10	10	100%
Meja 1/2 Biro	12	12	100%
Sketsel	1	1	100%
Kursi Rapat/Meeting	212	212	100%
Kursi Tamu	8	8	100%

Sarana dan Prasarana	Hasil Rekonsiliasi 2024	Usulan Standard Kebutuhan	% ketersediaan sarana dan prasarana
Kursi Putar	1	1	100%
Kursi Biasa	29	29	100%
Bangku Tunggu	3	3	100%
Kursi Lipat	95	95	100%
Partisi	3	3	100%
Sofa	1	1	100%
A.C. Split	10	12	100%
Kipas Angin	12	12	100%
Kompore Gas (Alat Dapur)	1	1	100%
Rice Cooker (Alat Dapur)	1	1	100%
Televisi	5	6	100%
Sound System	2	2	100%
Microphone	4	4	100%
Lambang Garuda Pancasila	1	1	100%
Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	1	100%
Tiang Bendera	1	1	100%
Mimbar/Podium	2	2	100%
Gordyin/Kray	2	2	100%
Alat Pemadam/Portable	3	3	100%
Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	100%
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1	100%
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	2	100%
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1	100%
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	6	100%
Kursi Kerja Pejabat kantor (lainnya)	27	27	100%
Buffet Kaca	1	1	100%
Telephone Hybrid	2	2	100%
Audio Tape Reel Recorder	1	1	100%
Digital LED Running Text	1	1	100%
Peralatan studio audio lainnya (dst)	2	2	100%
Camera Electronic	1	1	100%
Video Conference	1	1	100%
Telephon Mobile HP Androit	1	1	100%
Telex	2	2	100%
Alat Kedokteran umum lainnya	1	1	100%
Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	1	1	100%
P.C Unit	13	13	100%
Lap Top	13	13	100%
Note Book	4	4	100%
Monitor	1	1	100%
Printer (Peralatan Personal Komputer)	20	20	100%
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	4	100%

Sarana dan Prasarana	Hasil Rekonsiliasi 2024	Usulan Standard Kebutuhan	% ketersediaan sarana dan prasarana
Server	2	2	100%
Netware Interface External	3	3	100%
Acces Point	1	1	100%
Peralatan Komputer Lainnya (Mesin absensi)	1	1	100%
Peralatan Permainan Lainnya	1	1	100%
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	100%
Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1	1	100%
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1	100%
Gedung Pos Jaga Permanen	1	1	100%
Gedung Garasi/Pool Permanen	1	1	100%
Bangunan Tempat kerja Lain-lain (dst)	1	1	100%
Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	1	100%
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1	1	100%
Instalasi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	1	100%
Maket & Foto Dokumen Lain-lain	1	1	100%
Mesin Survey Kepuasan Pelanggan	1	1	100%
Mesin Antrian pelayanan	0	1	100%
Tablet samsung	0	1	100%
Alat pendingin Lainnya/ Air Cooler	2	2	100%
Karpet	3	3	100%
Mesin Pemotong Rumput	1	1	100%
Penangkal Petir	0	0	100%

Sumber : Rekonsiliasi RKBMD Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Tahun 2023

Tabel 3.13
Efisiensi Sarana dan Prasarana

No	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2024			Sarana dan Prasarana Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Hasil Rekon 2024	Usulan Standard Kebutuhan	% Ketersediaan Sarpras
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Mojoagung	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojoagung	73,5	73,48	99,97%	473	500	94,6%
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparaturn	100%	100%	100%	473	500	94,6%
2	Meningkatnya kualitas layanan publik Kecamatan Mojoagung	IKPP (Indeks Kualitas Pelayanan Publik) Kecamatan Mojoagung	8,7	8,3	95,40%	146	165	88,48%
2.	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	93	90,35	97,15%	46	65	100%
3.	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%	30	30	100%
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang	100%	100%	100%			

		ditindaklanjuti						
4	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%	15	15	100%
5	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%	25	25	100%
6.	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%	30	30	100%
PERSENTASE CAPAIAN KINERJA RATA-RATA					97,69%			91,54%
TINGKAT EFISIENSI SDM						11,65% (Efisiensi Tercapai)		

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat efisiensi pemanfaatan sarana dan prasarana Gedung kantor pada kisaran **6,15%** dalam pencapaian indikator kinerja Kecamatan Mojoagung.

3.3 Upaya Perbaikan Kinerja

- Indikator sasaran nilai SAKIP telah berhasil mencapai target yang ditetapkan, target nilai SAKIP ditetapkan 73,5 telah tercapai 73,48 dengan capaian 99,97%. Berdasarkan hasil reviu dari Inspektorat ada beberapa yang masih perlu dilakukan perbaikan untuk dokumen SAKIP untuk kedepannya yaitu:
 - Pada saat penyusunan dokumen perencanaan kinerja selanjutnya agar memperhitungkan capaian kinerja dalam pemberian penghargaan (reward).
 - Meningkatkan pemahaman pegawai melalui keterlibatan ”secara aktif” seluruh pegawai baik secara bersamaan ataupun berjenjang dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai dengan level paling operasional.
 - Melakukan koreksi pada SOP pengumpulan data kinerja agar menyajikan waktu pengumpulan atas setiap dokumen data kinerja.
 - Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi untuk merencanakan periode selanjutnya. Selain itu, penting untuk memperhatikan kinerja organisasi di atasnya agar dapat diketahui apakah kinerja individu/ perangkat daerah telah cukup menunjang kinerja organisasi di atasnya.
 - Melakukan pencermatan terhadap faktor penghambat/ permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja serta

upaya nyata yang diambil dalam pemecahan masalah dalam laporan kinerja yang mana harus terdapat kesinambungan di antara keduanya.

- f. Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada. Laporan kinerja perlu disusun melalui proses analisis yang tepat dan sungguh-sungguh melihat keberhasilan dan kegagalan melalui data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap periodenya selalu ada perbaikan dan peningkatan kinerja.
- g. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target dan capaian kinerja (outcome) berikutnya.

2. Indikator sasaran IKPP (Indeks Kualitas Pelayanan Publik) Kecamatan Mojoagung belum mencapai target yang ditetapkan dari nilai yang ditargetkan 8,7 tercapai 8,3 dengan capaian 95,40%. Untuk perbaikan IKPP tahun depan akan dilakukan beberapa alternatif perbaikan berdasarkan nilai IKM dan nilai IPP. Untuk nilai IKM berdasarkan 9 unsur SKM sebagai indikator penilaian IKM berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu pada unsur kompetensi petugas dan sarana/prasarana yaitu:

- a. Kompetensi petugas
 - Penerapan sistem reward dan punishment khusus petugas
 - Pelayanan untuk monitoring dan peningkatan kinerja pelayanan.
- Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama
- Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek pelayanan yang diadakan oleh Pemda Kab. Jombang
- a. Sarana dan Prasarana
 - Direncanakan pada Tahun 2024 akan dilaksanakan pengadaan Sarana dan Prasarana PATEN.

Sedangkan untuk unsur nilai IPP ditekankan alternatif perbaikan pada beberapa aspek penilaian IPP yaitu:

- a. Aspek Kebijakan Pelayanan
 - Informasi SKM agar dipublikasikan di area ruang pelayanan, media informasi, media sosial dan media cetak
- b. Aspek Profesionalisme SDM

- Penerapan sistem reward dan punishment khusus petugas
 - Pelayanan untuk monitoing dan peningkatan kinerja pelayanan.
 - Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama.
- c. Aspek Sarana dan Prasarana
- Direncanakan pada Tahun 2024 akan dilaksanakan pengadaan Sarana dan Prasarana PATEN.
- d. Konsultasi dan Pengaduan
- Arsip proses konsultasi terdokumentasi dan mudah diakses di website, dokumen/arsip lainnya
- e. INOVASI
- Pelayanan kecamatan Mojoagung menampilkan/ memamerkan produk unggulan desa dalam rangka mempromosikan produk-produk .
 - Menampilkan prosedur pelayanan dengan scan barcode.

A. Realisasi Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Mojoagung Tahun 2024, bahwa untuk mencapai sasaran ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program dan 13 kegiatan dan 26 sub kegiatan.

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja.Pada tahun 2024 ini Kecamatan Mojoagung mendapatkan anggaran sebesar Rp. 3.177.163.407,00 dengan realisasi anggaran mencapai Rp.2.904.458.072 atau serapan dana APBD mencapai 91,40% dimana sisa anggaran paling banyak terdapat pada sub kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sehingga dapat diketahui pada tahun 2024 kondisi anggaran silpa Rp. 272.705.335,00 yang secara rinci terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.13
Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Mojoagung	Nilai evaluasi AKIP Kecamatan Mojoagung	3.012.572.30,00	90,93%

2.	Meningkatnya kualitas layanan public Kecamatan Mojoagung	IKPP (Indeks Kualitas Pelayanan Publik) Kecamatan Mojoagung	164.591.100,00	100%
TOTAL			3.177.163.407,00	91,40%

Selanjutnya secara rinci pencapaian kinerja dan anggararan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Strategis
Kecamatan Mojoagung Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan Mojoagung	Nilai evaluasi SAKIP	73,50	73,48	99,97%	3.012.572.307	2.739.866.972	90,94%
2.	Meningkatnya kualitas layanan publik Kecamatan Mojoagung	IKPP (Indeks Kualitas Pelayanan Publik) Kecamatan Mojoagung	8,7	8,3	95,40%	164.591.100	164.591.100	100%
RATA –RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN					97,69%	3.177.163.407	2.904.458.072	91,40%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis guna mencapai tujuan Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Kecamatan Mojoagung dan Meningkatkan kualitas layanan publik Kecamatan Mojoagung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 91,40% telah menghasilkan kinerja yang melampaui target sebesar 97,69% dari target nilai dengan predikat **BAIK**.

BAB IV PENUTUP

Kecamatan mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Mojoagung berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2024 - 2026 Kecamatan Mojoagung .

Laporan kinerja Kecamatan Mojoagung Tahun 2024 memaparkan keberhasilan, kegagalan serta analisa program/kegiatan yang menunjang maupun hambatan dalam proses pencapaian pelaksanaan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2024. Capaian Kinerja tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yang diuraikan dari sasaran dan tujuan Kecamatan Mojoagung.

Selama Tahun 2024 melalui target pada Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai, peran Kecamatan terlihat melalui Sasaran Strategis yakni Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan Mojoagung dan Meningkatnya kualitas layanan publik Kecamatan Mojoagung secara keseluruhan, tercapai pencapaian kinerjanya dengan baik yakni sebesar 97,69%.

Pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang kurang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil yang telah dicapai. Dan sesuai dengan periodisasi Renstra yang berakhir pada Tahun 2024 masih tetap menghadapi tantangan untuk dapat mencapai target akhir pada periode Renstra 2024 - 2026. Adapun rincian capaian IKU sebagai berikut :

1. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojoagung belum mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 99,97% target periode akhir renstra 73,50

pada tahun 2024 telah tercapai 73,48.

2. IKPP (Indeks Kualitas Pelayanan Publik) Kecamatan Mojoagung pada tahun pertama renstra dengan target akhir 8,52 telah tercapai nilai 8,3 dengan tingkat kemajuan 97,42%.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Mojoagung untuk lebih meningkatkan kinerja adalah:

1. Indikator sasaran nilai SAKIP telah berhasil mencapai target yang ditetapkan, target nilai SAKIP ditetapkan 73,5 telah tercapai 73,48 dengan capaian 99,97%. Berdasarkan hasil reviu dari Inspektorat ada beberapa yang masih perlu dilakukan perbaikan untuk dokumen SAKIP untuk kedepannya yaitu:
 - a) Pada saat penyusunan dokumen perencanaan kinerja selanjutnya agar memperhitungkan capaian kinerja dalam pemberian penghargaan (reward).
 - b) Meningkatkan pemahaman pegawai melalui keterlibatan "secara aktif" seluruh pegawai baik secara bersamaan ataupun berjenjang dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai dengan level paling operasional.
 - c) Melakukan koreksi pada SOP pengumpulan data kinerja agar menyajikan waktu pengumpulan atas setiap dokumen data kinerja.
 - d) Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi untuk merencanakan periode selanjutnya. Selain itu, penting untuk memperhatikan kinerja organisasi di atasnya agar dapat diketahui apakah kinerja individu/ perangkat daerah telah cukup menunjang kinerja organisasi di atasnya.
 - e) Melakukan pencermatan terhadap faktor penghambat/ permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja serta upaya nyata yang diambil dalam pemecahan masalah dalam laporan kinerja yang mana harus terdapat kesinambungan di antara keduanya.
 - f) Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada. Laporan kinerja perlu disusun melalui proses analisis yang tepat dan sungguh-sungguh melihat keberhasilan dan kegagalan melalui data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap periodenya selalu ada perbaikan dan peningkatan kinerja.

g) Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target dan capaian kinerja (outcome) berikutnya.

2) Indikator sasaran IKPP (Indeks Kualitas Pelayanan Publik) Kecamatan Mojoagung belum mencapai target yang ditetapkan dari nilai yang ditargetkan 8,7 tercapai 8,3 dengan capaian 95,40%. Untuk perbaikan IKPP tahun depan akan dilakukan beberapa alternatif perbaikan berdasarkan nilai IKM dan nilai IPP. Untuk nilai IKM berdasarkan 9 unsur SKM sebagai indikator penilaian IKM berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu pada unsur kompetensi petugas dan sarana/prasarana yaitu:

a. Kompetensi petugas

Penerapan sistem reward dan punishment khusus petugas Pelayanan untuk monitoing dan peningkatan kinerja pelayanan.

Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama

Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek pelayanan yang diadakan oleh Pemda Kab. Jombang

b. Sarana dan Prasarana

Direncanakan pada Tahun 2025 akan dilaksanakan pengadaan Sarana dan Prasarana PATEN.

Sedangkan untuk unsur nilai IPP ditekankan alternatif perbaikan pada beberapa aspek penilaian IPP yaitu:

1. Aspek Kebijakan Pelayanan

Informasi SKM agar dipublikasikan diarea ruang pelayanan, media informasi, media sosial dan media cetak

2. Aspek Profesionalisme SDM

Penerapan sistem reward dan punishment khusus petugas Pelayanan untuk monitoing dan peningkatan kinerja pelayanan.

Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama.

3. Aspek Sarana dan Prasarana

Direncanakan pada Tahun 2025 akan dilaksanakan pengadaan Sarana dan Prasarana PATEN.

4. Konsultasi dan Pengaduan

Arsip proses konsultasi terdokumentasi dan mudah diakses di website, dokumen/arsip lainnya

5. INOVASI

Pelayanan kecamatan Mojoagung menampilkan/ memamerkan produk unggulan desa dalam rangka mempromosikan produk-produk .

Menampilkan prosedur pelayanan dengan scan barcode.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Mojoagung Tahun 2024 - 2026 yang juga tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Mojoagung Tahun 2024 dapat dipenuhi sesuai harapan. Namun demikian peningkatan kinerja selalu menjadi pedoman demi mendukung pencapaian Tujuan RPD Kabupaten Jombang Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mojoagung diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Mojoagung kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.

Mojoagung, 26 Januari 2025
CAMAT MOJOAGUNG



MUCHTAR, S.IP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19720621 199803 1 005

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang periode 2024-2026
Tabel 6.1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
								K	A	K	A	K	A	K	A		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
Meningk atnya Akuntabil itas dan Kinerja Birokrasi	Meningkatn ya Akuntabilita s dan Kinerja Kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kec. MOJOAG UNG	7.01.0 1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata- rata capaian kinerja aparatur	%	N/A	10 0	3,594,65 0,375	10 0	3,622,95 0,375	10 0	3,636,33 9,375	10 0	10,853,94 0,125	CAMAT	KECAMA TANMOJ OAGUNG
			7.01.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	%	N/A	10 0	20,000,0 00	10 0	12,000,0 00	10 0	17,000,0 00	10 0	49,000,00 0	SEKRETARIS	KECAMA TANMOJ OAGUNG
			7.01.0 1.2.01. 01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doku men	N/A	2	5,000,00 0	2	7,000,00 0	3	9,000,00 0	7	21,000,00 0	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG
			7.01.0 1.2.01. 06	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapor an	N/A	5	15,000,0 00	5	5,000,00 0	5	8,000,00 0	15	28,000,00 0	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI	KECAMA TANMOJ OAGUNG
			7.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan	1. Persentase pencairan gaji	%	N/A	10 0	2,995,81 0,375	10 0	2,996,41 0,375	10 0	2,996,81 0,375	10 0	8,989,031, 125	SEKRETARIS	KECAMA TANMOJ OAGUNG

TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
								K	A	K	A	K	A	K	A		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
				Perangkat Daerah	dan tunjangan ASN tepat waktu												
					2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	%	N/A	100		100		100		100		SEKRETARIS	KECAMATAN MOJOGONDOW
			7.01.01.2.02.01	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	N/A	21	2,918,212,375	21	2,918,212,375	21	2,918,212,375	63	8,754,637,125	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI	KECAMATAN MOJOGONDOW
			7.01.01.2.02.03	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	N/A	12	71,598,000	12	71,598,000	12	71,598,000	36	214,794,000	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI	KECAMATAN MOJOGONDOW
			7.01.01.2.02.05	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	N/A	1	6,000,000	1	6,600,000	1	7,000,000	3	19,600,000	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI	KECAMATAN MOJOGONDOW

TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
								K	A	K	A	K	A	K	A		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
			7.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan MOJOAGUNG	%	N/A	10 0	14,000.0 0	10 0	14,000,0 00	10 0	15,000,0 00	10 0	43,000,00 0	SEKRETARIS	KECAMA TANMOJ OAGUNG
			7.01.0 1.2.05. 02	1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	paket	N/A	42	14,000.0 0	42	14,000,0 00	42	15,000,0 00	12 6	43,000,00 0	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG
			7.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	N/A	10 0	104,840, 000	10 0	109,540, 000	10 0	119,529, 000	10 0	333,909,0 00	SEKRETARIS	KECAMA TANMOJ OAGUNG
			7.01.0 1.2.06. 01	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	N/A	10	1,000,00 0	12	1,100,00 0	15	1,500,00 0	37	3,600,000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG
			7.01.0 1.2.06. 02	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	N/A	25	18,000,0 00	25	19,800,0 00	25	20,000,0 00	75	57,800,00 0	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG

TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
								K	A	K	A	K	A	K	A		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
			7.01.0 1.2.06. 04	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	N/A	1	55,440,0 00	1	55,440,0 00	1	60,984,0 00	3	171,864,0 00	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG
			7.01.0 1.2.06. 05	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	N/A	2	8,000,00 0	2	8,800,00 0	2	9,645,00 0	6	26,445,00 0	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG
			7.01.0 1.2.06. 06	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Doku men	N/A	1	2,400,00 0	1	2,400,00 0	1	2,400,00 0	3	7,200,000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG
			7.01.0 1.2.06. 09	6. Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapor an	N/A	4	20,000,0 00	4	22,000,0 00	4	25,000,0 00	12	67,000,00 0	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG
			7.01.0 1.2.07	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	%	N/A	10 0	75,000,0 00	10 0	80,000,0 00	10 0	85,000,0 00	10 0	240,000,0 00	SEKRETARIS	KECAMA TANMOJ OAGUNG
			7.01.0 1.2.07. 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	N/A	1	-	1	-	1	-	1	-	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG

TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
								K	A	K	A	K	A	K	A		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
			7.01.0 1.2.07. 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	15	75,000,000	20	80,000,000	10	85,000,000	45	240,000,000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG
			7.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	N/A	100	115,000,000	100	123,000,000	100	125,000,000	100	363,000,000	SEKRETARIS	KECAMA TANMOJ OAGUNG
			7.01.0 1.2.08. 02	1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	N/A	24	25,000,000	24	28,000,000	24	30,000,000	72	83,000,000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG
			7.01.0 1.2.08. 04	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	24	90,000,000	24	95,000,000	24	95,000,000	72	280,000,000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG
			7.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	N/A	100	270,000,000	100	288,000,000	100	278,000,000	100	836,000,000	SEKRETARIS	KECAMA TANMOJ OAGUNG

TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
								K	A	K	A	K	A	K	A		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
			7.01.0 1.2.09. 02	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/A	10	30,000,0 00	10	33,000,0 00	10	33,000,0 00	30	96,000,00 0	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG
			7.01.0 1.2.09. 09	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitas	unit	N/A	2	200,000, 000	2	210,000, 000	2	200,000, 000	6	610,000,0 00	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG
			7.01.0 1.2.09. 10	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitas	Unit	N/A	20	40,000,0 00	25	45,000,0 00	25	45,000,0 00	70	130,000,0 00	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG
	2. Meningkatkan nya kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayana n Publik (IKPP) Kecamat	7.01.0 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	Nilai	N/A	84 ,5	10,000,0 00	85	15,000,0 00	85 ,5	20,000,0 00	85 ,5	45,000,00 0	CAMAT	KECAMA TANMOJ OAGUNG

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR OR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
								K	A	K	A	K	A	K	A		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
		an Mojoagu ng	7.01.0 2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	%	N/A	10 0	10,000,0 00	10 0	15,000,0 00	10 0	20,000,0 00	10 0	45,000,00 0	KEPALA SEKSI TATA PemerintahA N	KECAMA TANMOJ OAGUNG
			7.01.0 2.2.02. 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan (laporan admin duk, perijinan, dan non perijinan tiap bulan an)	N/A	12	10,000,0 00	12	15,000,0 00	12	20,000,0 00	36	45,000,00 0	KEPALA SEKSI TATA PemerintahA N	KECAMA TANMOJ OAGUNG
			7.01.0 5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	%	N/A	10 0	35,000,0 00	10 0	37,000,0 00	10 0	45,000,0 00	10 0	117,000,0 00	CAMAT	KECAMA TANMOJ OAGUNG

TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
								K	A	K	A	K	A	K	A		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
					Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	%	N/A	100		100		100		100		CAMAT	KECAMATAN MOJOAGUNG
			7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	laporan	N/A	5	35,000,000	5	37,000,000	5	45,000,000	15	117,000,000	KEPALA SEKSI SOSIAL BUDAYA	KECAMATAN MOJOAGUNG
					Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	dokumen	N/A	4		4		4		4		KEPALA SEKSI SOSIAL BUDAYA	KECAMATAN MOJOAGUNG
			7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	orang (tidak hanya PHBN harus ada aktivitas pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa)	N/A	100	20,000,000	100	22,000,000	100	30,000,000	300	72,000,000	KEPALA SEKSI SOSIAL BUDAYA	KECAMATAN MOJOAGUNG

TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
								K	A	K	A	K	A	K	A		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
			7.01.0 5.2.01. 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	doku men	N/A	4	15,000,0 00	4	15,000,0 00	4	15,000,0 00	12	45,000,00 0	KEPALA SEKSI SOSIAL BUDAYA	KECAMA TANMOJ OAGUNG
			7.01.0 4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	%	N/A	10 0	9,000,00 0	10 0	16,500,0 00	10 0	18,000,0 00	10 0	42,000,00 0	CAMAT	KECAMA TANMOJ OAGUNG
			7.01.0 4.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	%	N/A	10 0	9,000,00 0	10 0	16,500,0 00	10 0	18,000,0 00	10 0	42,000,00 0	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG

TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
								K	A	K	A	K	A	K	A		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
			7.01.0 4.2.02. 01	Koordinasi/Siner gi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Lapor an	N/A	12	9,000,00 0	12	15,000,0 00	12	18,000,0 00	36	42,000,00 0	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG
			7.01.0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	%	N/A	10 0	10,000,0 00	10 0	17,000,0 00	10 0	19,000,0 00	10 0	46,000,00 0	CAMAT	KECAMA TANMOJ OAGUNG
			7.01.0 6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	desa	N/A	18	10,000,0 00	18	17,000,0 00	18	19,000,0 00	18	46,000,00 0	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHA N	KECAMA TANMOJ OAGUNG
			7.01.0 6.2.01. 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	doku men (LRA SMT 1 dan LRA Akhir tahun)	N/A	36	10,000,0 00	36	17,000,0 00	36	19,000,0 00	10 8	46,000,00 0	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHA N	KECAMA TANMOJ OAGUNG

TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
								K	A	K	A	K	A	K	A		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
			7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	%	N/A	100	60,000,000	100	67,000,000	100	71,000,000	100	198,000,000	CAMAT	KECAMA TANMOJ OAGUNG
			7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	Lemba ga	N/A	36	60,000,000	36	67,000,000	36	71,000,000	36	198,000,000	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA	KECAMA TANMOJ OAGUNG
					Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	Desa	N/A	18		18		18		18		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA	KECAMA TANMOJ OAGUNG
			7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	lapora n	N/A	4	20,000,000	4	22,000,000	4	25,000,000	12	67,000,000	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA	KECAMA TANMOJ OAGUNG

TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
								K	A	K	A	K	A	K	A		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
			7.01.0 3.2.01. 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	lemba ga kemas yakata n (PKK, LPMD, Karan g Tarun a, RT, RW, Posya ndu)	N/A	10 8	40,000,0 00	10 8	45,000,0 00	10 8	46,000,0 00	10 8	131,000,0 00	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA	KECAMA TANMOJ OAGUNG

B. CAPAIAN KINERJA SASARAN

Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Mojoagung	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojoagung	73,50	73,48	99,97%
Meningkatnya kualitas layanan publik	IKPP (Indeks Kualitas Pelayanan Publik) Kecamatan Mojoagung	8,7	8,3	95,40%
Rata-Rata Capaian IKU				97,69%

Sumber: LkjIP Kec. Mojoagung 2024

Perbandingan Realisasi Kinerja
Pada Dokumen Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Akhir Renstra	Persentase realisasi target sasaran Renstra sampai tahun 2024
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Mojoagung	Nilai Evaluasi SAKIP	73,5	73,48	99,97%
Meningkatnya kualitas layanan publik	IKPP (Indeks Kualitas Pelayanan Publik) Kecamatan Mojoagung	8,52	8,3	97,42%
RATA-RATA TINGKAT KEMAJUAN				98,69%

C. KESIMPULAN

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:

Pada tahun 2024 target sasaran strategis renstra dapat tercapai dengan rata – rata capaian kinerja 98,69%.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP belum mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 99,97% target periode akhir renstra 73,50 pada tahun 2024 telah tercapai 73,48.
2. IKPP (Indeks Kualitas Pelayanan Publik) Kecamatan Mojoagung pada tahun pertama renstra dengan target akhir 8,52 telah tercapai nilai 8,3 dengan tingkat kemajuan 97,42%.

D. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

1. Indikator sasaran nilai SAKIP telah berhasil mencapai target yang ditetapkan, target nilai SAKIP ditetapkan 73,5 telah tercapai 73,48 dengan capaian 99,97%. Berdasarkan hasil reviu dari Inspektorat ada beberapa yang masih perlu dilakukan perbaikan untuk dokumen SAKIP untuk kedepannya yaitu:
 - a. Pada saat penyusunan dokumen perencanaan kinerja selanjutnya agar memperhitungkan capaian kinerja dalam pemberian penghargaan (reward).
 - b. Meningkatkan pemahaman pegawai melalui keterlibatan ”secara aktif” seluruh pegawai baik secara bersamaan ataupun berjenjang dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai dengan level paling operasional.
 - c. Melakukan koreksi pada SOP pengumpulan data kinerja agar menyajikan waktu pengumpulan atas setiap dokumen data kinerja.
 - d. Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi untuk merencanakan periode selanjutnya. Selain itu, penting untuk memperhatikan kinerja organisasi di atasnya agar dapat diketahui apakah kinerja individu/ perangkat daerah telah cukup menunjang kinerja organisasi di atasnya.
 - e. Melakukan pencermatan terhadap faktor penghambat/ permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja serta upaya nyata yang diambil dalam pemecahan masalah

dalam laporan kinerja yang mana harus terdapat kesinambungan di antara keduanya.

- f. Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada. Laporan kinerja perlu disusun melalui proses analisis yang tepat dan sungguh-sungguh melihat keberhasilan dan kegagalan melalui data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap periodenya selalu ada perbaikan dan peningkatan kinerja.
 - g. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target dan capaian kinerja (outcome) berikutnya.
2. Indikator sasaran IKPP (Indeks Kualitas Pelayanan Publik) Kecamatan Mojoagung belum mencapai target yang ditetapkan dari nilai yang ditargetkan 8,7 tercapai 8,3 dengan capaian 95,40%. Untuk perbaikan IKPP tahun depan akan dilakukan beberapa alternatif perbaikan berdasarkan nilai IKM dan nilai IPP. Untuk nilai IKM berdasarkan 9 unsur SKM sebagai indikator penilaian IKM berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu pada unsur kompetensi petugas dan sarana/prasarana yaitu:
- a. Kompetensi petugas
 - Penerapan sistem reward dan punishment khusus petugas
 - Pelayanan untuk monitoing dan peningkatan kinerja pelayanan.
 - Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama
 - Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek pelayanan yang diadakan oleh Pemda Kab. Jombang
 - b. Sarana dan Prasarana
 - Direncanakan pada Tahun 2025 akan dilaksanakan pengadaan Sarana dan Prasarana PATEN.
- Sedangkan untuk unsur nilai IPP ditekankan alternatif perbaikan pada beberapa aspek penilaian IPP yaitu:
- c. Aspek Kebijakan Pelayanan
 - Informasi SKM agar dipublikasikan diarea ruang pelayanan, media informasi, media sosial dan media cetak
 - d. Aspek Profesionalisme SDM
 - Penerapan sistem reward dan punishment khusus petugas

- Pelayanan untuk monitoing dan peningkatan kinerja pelayanan.
 - Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama.
- c. Aspek Sarana dan Prasarana
- Direncanakan pada Tahun 2025 akan dilaksanakan pengadaan Sarana dan Prasarana PATEN.
- d. Konsultasi dan Pengaduan
- Arsip proses konsultasi terdokumentasi dan mudah diakses di website, dokumen/arsip lainnya
- e. INOVASI
- Pelayanan kecamatan Mojoagung menampilkan/ memamerkan produk unggulan desa dalam rangka mempromosikan produk-produk .
 - Menampilkan prosedur pelayanan dengan scan barcode.

Mengetahui,
CAMAT MOJOAGUNG
KABUPATEN JOMBANG

Jombang, 26 Januari 2025
KETUA TIM SAKIP
KECAMATAN MOJOAGUNG

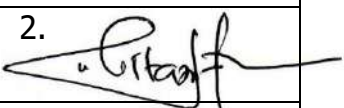
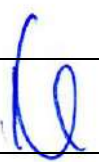


MUCHTAR, S.IP.,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 197206211998031005



WAHYU TEGUH WICAKSONO, S.STP
Penata Tk. I
NIP. 19820317 200012 1 00

DAFTAR HADIR MONITORING CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN MOJOAGUNG
KABUPATEN JOMBANG

DAFTAR HADIR		
No	NAMA	TANDA TANGAN
1.	SEKRETARIS CAMAT	1. 
2.	KASUBBAG SUNGRAM	2. 
3.	KASI TATA PEMERINTAHAN	3. 
4.	KASI PMD	4. 
5.	KASI SOSBUD	5. 
6.	KASI TRANTIB	6. 
7.	KASUBBAG UMUM	7. 



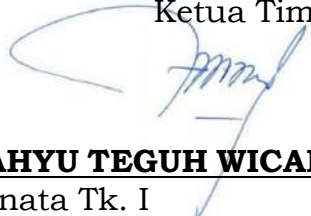
Mengetahui
Camat Mojoagung



MUCHTAR, S.IP., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19720618 199803 1 005

Mojoagung, 4 Januari 2025

Ketua Tim SAKIP



WAHYU TEGUH WICAKSONO, S.STP
Penata Tk. I
NIP. 19820317 200012 1 001

LAMPIRAN

